

## DAFTAR PUSTAKA

### REGULASI

- \_\_\_\_\_.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- \_\_\_\_\_.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- \_\_\_\_\_.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- \_\_\_\_\_.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- \_\_\_\_\_.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umm Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- \_\_\_\_\_.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
- \_\_\_\_\_.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- \_\_\_\_\_.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.
- \_\_\_\_\_.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- \_\_\_\_\_.Peraturan Walikota Malang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### BUKU

- Alamsyah Kamal. 2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Anggito, Albi., Johan, Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. 2018. *Policy Paper : Pengembangan Digital Government*. Jakarta Selatan

- H. Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Truen RTH.
- Indrajit, Richardus E. 2002, *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi
- Indrajit, Richardus Eko. 2016. *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta: Andi
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2008. *Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha*. Jakarta, hal 2.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nugroho, D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Moleong. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Muluk, M.R. Khairul. 2008. *Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Setianto, A. Yudi, dkk. (2008) *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen (Perijinan, Pribadi, Keluarga, dan Bisnis)*. Jakarta: Pranita Offset.
- Sirajuddin, dkk. 2012. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press.
- Siswosoediro, Henry. 2008. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. Jakarta: Visimedia.
- Suharto, Edi. 2008. *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus Pengalaman Departemen Sosial*. Focused Group Discussion (FGD) : Sahira Butik Hotel, Bogor 9 – 10 Oktober 2008.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : CV Alfabeta

- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan Publik: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Roja, Yunita San. 2017. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Sikka*. [Skripsi]. Hal 29.

## JURNAL

- Zericka, M. Dhenda. 2013. *Penerapan Electronic Service dalam Pengembangan Informasi di Kabupaten Kutai Kartanegara*. e-journal Ilmu Komunikasi. Volume 1, Nomor 1, 345-361.
- Rahim, Abdul, dkk. 2017. *Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala*. e-journal Katalogis, Volume 5 Nomor 11, 25-35
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar*. e-jurnal Administrasi Publik, Volume 6 No. 2.
- Suwardana, Hendra. 2018. *Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental*. Ejournal, Volume 1, Nomor 2, 109-118
- Basuki, Johannes. 2018. *Ekologi Administrasi Publik di Indonesia dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik*. Publik Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Volume 3 No 2, 54

## INTERNET

- Anggraeni, Pipit. 2020. *Siap-Siap, Aplikasi Perizinan Online Disnaker-PMPTSP Kota Malang Segera Diluncurkan*. diakses dari <https://www.malangtimes.com/baca/50222/20200317/132900/siap-siap-aplikasi-perizinan-online-disnaker-pmptsp-kota-malang-segera-diluncurkan>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2019. *Pelaksanaan Sistem Online Single Submission & Pokok Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*. [ppt]. diakses dari <https://oss.go.id/portal/informasi/content/bimtek>
- \_\_\_\_\_. 2019. *Perizinan Berusaha Melalui OSS*. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss> pada Mei 2020.